

## **Mempolitisasi Ruang Virtual: Posisi Warga-Net dalam Praktik Demokrasi Digital di Indonesia**

<sup>1)</sup>Zainal Fatah, <sup>2)</sup>Megasari Noer Fatanti

<sup>1)</sup>Dosen Tetap Jurusan Administrasi Negara, Universitas Dr. Soetomo, Indonesia

<sup>2)</sup>Jurusan Sosiologi, Universitas Negeri Malang, Indonesia

<sup>1)</sup>[zfatah64@gmail.com](mailto:zfatah64@gmail.com) <sup>2)</sup>[megasari.fatanti.fis.um.ac.id](mailto:megasari.fatanti.fis.um.ac.id)

### **ABSTRAK**

Sebuah agensi global, *WeAreSocial* melansir jumlah pengguna internet di Indonesia yang mencapai 150 juta jiwa di awal tahun 2019. Kehadiran internet yang mulanya hanya dianggap sebagai medium pengantar pesan, menjadi semakin kompleks ketika publik menggunakan Internet sebagai ruang alternatif dalam menyampaikan gagasan (Dahlberg, 2001). Kemajuan Internet seolah mampu menciptakan ruang politik yang tanpa sekat, tanpa pengawasan. Beberapa gerakan kolektif yang lahir dari aktifnya pengguna internet di Indonesia antara lain *Aksi Koin Peduli Prita*, *Aksi Bela Islam (212, 411)*, dan *Aksi Bali Tolak Reklamasi*. Sedangkan di belahan dunia lain, kemenangan Donald Trump sebagai Presiden ke-45 Amerika Serikat seolah menunjukkan bahwa internet dan media sosial juga memiliki wajah buruk yang dapat mencederai demokrasi. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa Internet dan media sosial mampu menciptakan cara baru berpartisipasi dalam politik. Dengan hadirnya Internet, berbagai informasi politik, sosialisasi politik, kampanye politik, hingga protes politik dapat dipublikasikan dan dipertukarkan dengan waktu yang lebih cepat. Selain itu, kemampuan Internet dalam membangun komunikasi dua arah menjadikan partisipasi politik tidak harus hadir secara fisik dalam debat terbuka politisi atau demonstrasi di jalan. Melalui gagasan ruang publik Jurgen Habermas, penulis mencoba untuk menelusuri dan mengungkapkan bagaimana peran dan masa depan pengguna Internet dalam logika demokrasi digital di Indonesia. Beberapa contoh kasus di Indonesia maupun internasional disajikan sebagai objek studi yang bekerja dengan metode kualitatif. Pengumpulan data berupa observasi dan studi pustaka diharapkan dapat menyajikan ilustrasi komprehensif bagaimana potret pengguna Internet di Indonesia. Untuk lebih memudahkan analisis kasus yang disajikan, peneliti meminjam gagasan Diana Saco tentang demokrasi digital. Hasil penelitian diarahkan pada bagaimana gagasan Habermas dan Saco dapat menjelaskan fenomena politik kontemporer di Indonesia dengan memfokuskan pada keaktifan subjek yang bebas dan konsepsi ruang publik deliberatif.

**Kata kunci:** ruang publik, demokrasi digital, partisipasi politik, politik deliberatif, Internet

### *Abstract*

*A global agency, WeAreSocial launched the number of internet users in Indonesia which reached 150 million in early 2019. The presence of the internet which was originally only regarded as a*

*medium to deliver messages became increasingly complex when the public used the Internet as an alternative space to convey ideas (Dahlberg, 2001). The progress of the Internet seems to be able to create a political space without a barrier, without supervision. Some collective movements that were born from the active participation of internet users in Indonesia include the Aksi Koin Peduli Prita, Aksi Bela Islam (212, 411), and Bali Tolak Reklamasi. While in other parts of the world, the victory of Donald Trump as the President of the United States seems to show that the internet and social media also have a bad face that can harm democracy. This phenomenon shows that the Internet are able to create new ways to participate in politics. With the presence of the Internet, various political information, political socialization, political campaigns, and political protests can be published and exchanged for a faster time. In addition, the ability of the Internet to build two-way communication has made political participation not necessarily physically present in politicians' open debates or demonstrations on the streets. Through the ideas of public space Jurgen Habermas, the author tries to explore and reveal how the roles and future of Internet users are in the logic of digital democracy in Indonesia. Some examples of cases in Indonesia and internationally are presented as objects of study that work with qualitative methods. Data collection in the form of observations and literature is expected to provide comprehensive illustrations of how portraits of Internet users in Indonesia are portrayed. To further facilitate the analysis of the cases presented, researchers borrowed Diana Saco's ideas about digital democracy. The results of the study are directed at how Habermas and Saco's ideas can explain the phenomenon of contemporary politics in Indonesia by focusing on the activity of a free subject and the conception of deliberative public space.*

**Keywords:** *public sphere, digital democracy, political participation, deliberative politics, Internet*

---

## **A. PENDAHULUAN**

Internet awalnya merupakan aktivitas para penggemar jaringan teknologi komputer (Purbo dan Walton, 2010). Dalam artikel yang ditulis Merlyna Lim (2005) dijelaskan bahwa Joseph Luhukay, seorang doktor di bidang filosofi ilmu komputer, yang menjadi pionir dalam pengembangan jaringan internet di tahun 1983 dengan nama UINet di kampus Universitas Indonesia. Joseph pada akhirnya memperluas jaringan internet yang ia rancang ke beberapa universitas seperti Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada (UGM),

Institut Teknologi Surabaya (ITS), Universitas Hasanuddin (UNHAS), dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen DIKTI). Hingga pada akhirnya di tahun 1994, Internet memasuki ranah komersial ketika Indonet mengambil peran sebagai *Internet Service Provider* (ISP) di Indonesia. Melalui jaringan Indonet, pengguna internet di Indonesia mulai tumbuh (Lim, 2005).

Seiring dengan kemajuan Indonet, perkembangan konten internet semakin menggeliat pada pertengahan tahun 1990-an (Lim, 2005). Beberapa media cetak turut meramaikan konten internet, seperti

Republika, Kompas, dan Tempo (Margianto dan Syaefullah, 2012). Selanjutnya, *detik.com* lahir pada Juli 1998, tepat dua bulan pasca gelombang reformasi terjadi di Indonesia, menjadi penanda perubahan wajah media *online* secara signifikan dari sisi konten (Anggoro, 2012). Tidak hanya berhasil mengubah bentuk jurnalisme, internet ternyata memiliki peran yang sangat penting di era reformasi tahun 1998. Peran tersebut ditunjukkan oleh sekelompok anak muda yang menggunakan internet sebagai alat perjuangan penting dalam menurunkan rezim Soeharto (Lim, 2005). Pada saat itu, internet mampu mengurangi kekuasaan pemerintah dalam mengontrol informasi. Sejak peristiwa reformasi, internet dianggap memiliki kekuatan yang mampu menciptakan ruang baru bagi diskusi politik praktis yang tidak bisa dilakukan pada medium *offline*.

Sementara preseden Internet menunjukkan potensi dunia maya untuk menghubungkan warga negara satu sama lain secara partisipatif, industri media massa yang didominasi perusahaan melihat dunia maya terutama sebagai sistem distribusi produk dan sarana kontrol opini. Jacob Oetama dalam sebuah wawancara dengan Majalah *Prisma* tahun 2017 menyebutkan bahwa industri digital bukan semata sebagai pesaing dari kelanggengan media mainstream, kehadirannya dapat disinergikan ke dalam beberapa dimensi. Seperti bentuk liputan (berita), sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi itu sendiri. Tak lupa juga ia mengingatkan bahwa kehadiran Internet dan media sosial dianggap mampu menuntut kejelian, kreativitas dan kecerdasan pekerja media *mainstream* di Indonesia. Kecepatan dan kemudahan akses yang ditawarkan media

sosial juga dapat diimbangi dengan produk jurnalistik mumpuni dari surat kabar dan televisi.

Untuk menilai bagaimana dunia maya sebenarnya akan diterapkan, kita perlu memeriksa konteks politik di mana ruang maya akan berkembang (Moore dalam Hague dan Loader, 1999). Menyitir pendapat Bugeja (2017) dalam buku yang berjudul *Interpersonal Divide in the Age of the Machine* dijelaskan bahwa teknologi memiliki kemampuan untuk menghadirkan komunitas virtual. Ia mengaburkan batas-batas geografis dan identitas sehingga mampu menghubungkan siapa saja individu yang ada di dalamnya. Tidak cukup itu, Internet memungkinkan siapapun dapat bergabung di dalamnya dengan ongkos murah. Kemampuan Internet melakukan masifikasi wacana serta terbukanya keterlibatan individu dalam pusan informasi menjadikannya sebagai saluran komunikasi politik yang efektif bagi pemula. Terlebih lagi, Internet mampu mengaburkan batas-batas antara yang nyata dan virtual seolah manusia hidup dalam dua tubuh yang berbeda, tubuh biologis dan “tubuh teknologis”.

Warganet, atau dikenal dengan *netizen*, mengalami kepemilikan global atas isu-isu yang berkembang di Internet atau media sosial. Orang yang berpikiran sama dapat secara virtual berkumpul bersama, melintasi zona waktu untuk membahas isu yang sama. Informasi yang mungkin tidak diketahui siapa pembuatnya dapat melintasi ruang tak terbatas, menggelinding liar dan berpotensi menjadi opini publik. Peran *gatekeeper* yang dulu dipegang teguh oleh para redaktur media massa konvensional, sekarang beralih ke persepsi masing-masing individu pembuat konten informasi/berita.

Bahkan, dalam konteks mahadata, teknologi memiliki kemampuan untuk memproyeksikan rentang pilihan setiap individu yang terkait. Dengan kata lain, sistem algoritma juga memungkinkan korporasi atau lembaga pemerintahan untuk menghubungkan secara kilat berbagai data personal, psikologis, dan sosiologis jutaan pengguna Internet demi kepentingannya.

Gejala awal pentingnya kehadiran Internet dalam konteks politik yaitu ketika rezim Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto. Pada masa itu, internet dengan fasilitas yang bernama *milis* berhasil menciptakan ruang diskusi yang bebas dengan tujuan menentang rezim Orde Baru. Pesan-pesan beredar di Internet dengan sangat lugas, hingga menurut Marcus DL (1999), saat gelombang reformasi terjadi di Indonesia, pengunjung rasa tidak memiliki *tank* atau senjata yang kuat, namun mereka memiliki alat mampu menumbangkan sebuah rezim, yaitu Internet. Kekuatan internet semakin terasa ketika pada 15 Mei 1998 Menteri Penerangan mengeluarkan kebijakan pengawasan atas media cetak dan elektronik. Satu-satunya ruang publik yang bebas dari jangkauan pemerintah adalah Internet. Lim (2005) menyatakan bahwa sepanjang masa itu, informasi tentang pergerakan mahasiswa mudah untuk diakses tanpa ada pengawasan dari pemerintah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, aktivitas protes banyal ditemukan di *milis* pro-reformasi, seperti *Apa kabar dan IndoProtest*. Internet menjadi penanda yang sangat jelas perlawanan mahasiswa terhadap rezim Soeharto.

Selain pada masa Orde Baru di Indonesia, keberhasilan Internet sebagai infrastruktur ruang publik juga terjadi dalam beberapa gerakan protes di beberapa negara

seperti *Arab Spring* di Timur Tengah tahun 2010, Gerakan *Malaysia Bersih 3.0* di Malaysia tahun 2012, dan *Umbrella Movements* di Hongkong tahun 2014. Keberhasilan gerakan sosial baru melalui Internet atau media sosial seolah meneguhkan posisi Internet yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Internet membawa tawaran yang menarik dengan merevolusi gaya komunikasi politik tradisional yang cenderung (mudah) terdistorsi beralih ke komunikasi informasional (Castell, 2010). Ketika media digital menjadi semakin melekat dengan aktivitas keseharian, dengan konektivitas tanpa henti, percakapan dan tindakan politik pun sedikit banyak akan semakin terjerat dengan dunia tanpa batas tersebut (Lim 2018). Pendapat senada pernah disampaikan oleh Anthony G Wilhelm (1999) dalam konsep *cyberspace* yang dinilai mampu merepresentasikan ruang yang bisa digunakan untuk melakukan tindakan atau aktivitas politik. Individu dapat terlibat dalam berbagai macam kegiatan politik. *Cyberspace* tidak membatasi ruang gerak bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik, seperti kampanye hingga protes.

Merujuk pada gagasan Jürgen Habermas tentang *public sphere* (ruang publik), yaitu ruang yang memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk dapat menyatakan opini/pendapat, kepentingan dan kebutuhan secara diskursif. Ruang publik tidak hanya sebagai institusi atau organisasi legal, melainkan juga bagian dari proses komunikasi antar warga itu sendiri (Hardiman, 2009: 128). Definisi ruang publik Habermas menjadi landasan untuk melihat bagaimana dinamika pengguna Internet (warganet) memanfaatkan teknologi dalam pemenuhan

informasi dan partisipasi politik. Internet menjadi ruang berdebat, dimana kebebasan berbicara tidak terdistorsi oleh kepentingan kelompok penguasa dan informasi dapat disebarluaskan serta diterima secara bebas (Savigny, 2002). Ruang alternatif ini digunakan oleh pengguna Internet di Indonesia untuk mendiskusikan isu-isu politik yang tak mungkin muncul dalam percakapan *offline*.

Artikel ini tidak membahas lebih lanjut tentang bagaimana perkembangan internet dalam realitas media massa, melainkan lebih memfokuskan pada peran internet dalam keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Internet dapat menjadi instrumen politik yang efisien jika dilihat sebagai bagian dari demokrasi di mana wacana bebas dan terbuka dalam ruang publik yang vital memainkan peran yang menentukan. Namun, di sisi yang lain, Internet juga diyakini dapat menimbulkan kegaduhan politik apabila tidak dibarengi dengan literasi informasi yang baik. Secara lebih spesifik yaitu menelusuri bagaimana aktivitas dan peran warganet dalam memanfaatkan Internet serta melihat sejauhmana Internet sebagai infrastruktur ruang publik di Indonesia. Meminjam konsepsi ruang publik Habermas dan mendalaminya dengan gagasan demokrasi digital *ala* Diana Saco, penulis berargumen bahwa iklim demokrasi di Indonesia dapat semakin sehat dengan adanya kanal-kanal informasi alternatif sebagai ruang adu argumen dan kebebasan berpendapat yang dilindungi sehingga tercipta partisipasi warga yang tak bersekat. Internet dan media sosial dinilai mampu mendorong dan menciptakan ruang partisipasi bagi warga (Fatanti, 2014).

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Partisipasi dalam sistem tata kelola dianggap sebagai tonggak demokrasi (Arnstein, 1969). Terlebih lagi, dalam masyarakat yang sungguh demokratis sejatinya akan bersandar pada kesadaran akan informasi sehingga mampu membuat pilihan-pilihan politis. Oleh sebab itu, akses terhadap informasi tidak hanya menjadi hak dasar warga, tetapi juga sebuah prasyarat dari demokrasi itu sendiri (Joseph, 2005). Dalam hal ini, media memikul tanggung jawab yang sangat penting dalam melindungi dan memberdayakan warga dalam pemenuhan hak pemenuhan informasi serta menyediakan ruang publik bagi keterlibatan masyarakat. Melalui media, informasi, gagasan, pandangan, dan wacana saling dipertukarkan dan kemajuan masyarakat juga tercermin di dalamnya. Dalam konteks masyarakat modern, media tertanam secara mendalam dalam tatanan kehidupan sosial (sejauh ini tidak ada perkara sosial yang tidak melibatkan media).

Media sebagai pilar keempat seharusnya berperan penting dalam konteks demokrasi di Indonesia (Schultz, 1998). Akan tetapi, dengan logika pasar dan kepentingan bisnis yang semakin ditempatkan di atas kepentingan publik, maka apa yang terjadi dengan media massa di Indonesia saat ini semakin tidak menyisakan ruang bersama bagi warga untuk terlibat. Namun demikian, perkembangan media baru (dalam tulisan ini disebut Internet) telah membuka ruang alternatif bagi warga untuk mendiskusikan isu-isu publik yang seharusnya disediakan oleh media konvensional - walaupun begitu, bukan berarti ranah publik yang diberdayakan oleh Internet bebas dari kontestasi. Kepentingan publik, yang tidak

difasilitasi oleh media tradisional mencuat ke saluran-saluran media baru, seperti *blog*, *twitter*, *facebook* dan *Instagram*.

Seperti yang telah disampaikan di atas bahwa era konvergensi media yang ditandai kemunculan Internet sebagai medium dalam mendistribusikan informasi (berita), warga tidak lagi dipandang sebagai audiens dalam pengertian sekedar mengonsumsi informasi yang disajikan semata. Salah satu karakter pembeda dari media konvensional adalah Internet menyediakan kolom interaksi, sehingga seyiap berita yang diproduksi dan dipublikasikan secara daring, maka warga selaku audiens bisa menanggapi, mengkritisi, bahkan menambahkan informasi tambahan terhadap berita tersebut.

Merujuk gagasan Jürgen Habermas tentang ruang publik bahwa di abad ke-18, kafe, salon atau tempat-tempat perkumpulan sebagai arena dalam melakukan diskusi publik (*public sphere*), pasca tahun 1990-an dimana era Internet hadir sebagai arena virtual yang dapat digunakan untuk merespons realitas yang terjadi (Nasrullah, 2012). Terminologi *public sphere* atau ruang publik ala Habermas dipopulerkan tahun 1989 melalui buku *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society* menjelaskan konsep “ruang” yang tercipta dari kumpulan orang-orang tertentu (*private people*) seolah-olah diciptakan sebagai bentuk penyikapan terhadap otoritas publik. Kondisi ini muncul karena adanya perubahan kultur warga dalam menanggapi realitas dan aturan-aturan politik di abad ke-18; seiring intelektual warga semakin meningkat, melek media, akses terhadap karya bermutu serta jurnalisme yang lebih kritis melalui pemberitaan yang

dipublikasikan. Jika ditarik kesimpulan, ruang publik ala Habermas merupakan ruang yang bekerja dengan memakai landasan wacana moral praktis yang melibatkan interaksi secara rasional maupun kritis dibangun dengan tujuan untuk mencari pemecahan masalah-masalah politik.

Ruang siber pada dasarnya menyediakan apa yang disebut Jones (1997) sebagai *new public space*. Secara digital, karakteristik *public space* atau *virtual space* bisa dimaknai sebagai sesuatu yang umum, atau yang sifatnya pribadi, antar-budaya, hingga pada publik yang terkontrol atau yang bebas. Ibarat taman kota, dimana kita bisa menemukan beragam karakteristik termasuk juga latar belakang entitas yang berada di sana. Namun perlu diingat, tidak otomatis kita menjadi bagian dari ruang tersebut; kita bisa menemukan entitas yang berkelompok di taman kota, tetapi kita tidak bisa begitu saja masuk ke dalam kelompok mereka. Menurut Camp dan Chien (2000), *virtual space* tidaklah sama dengan media konvensional, ruang siber menyediakan fasilitas bagi pengguna untuk menemukan cara baru dalam berinteraksi balik dalam aspek ekonomi, politik, dan sosial. Realitas di ruang siber inilah yang menjadikan internet sebagai ruang terbuka bagi siapapun untuk berinteraksi. Manuel Castells (2001) dan Van Dijk (2006) mengatakan bahwa apabila seseorang telah melakukan koneksi (terhubung), maka secara otomatis ia telah menjadi bagian dari masyarakat jejaring (*network society*).

Namun, penulis menegaskan bahwa apa yang disebut sebagai *public space* tidaklah sama dengan *public sphere* sebagaimana dimaksud oleh Habermas. Sebab, internet dapat dikatakan hanya sebagai medium yang dapat digunakan

untuk diskusi atau debat politik, pertukaran ide maupun gagasan, hingga membangun wacana sebagai jawaban terhadap realitas politik. Papacharissi (2002) menegaskan bahwa *A virtual space enhances discussion; a virtual sphere enhances democracy*, pernyataan ini lebih memandang internet dapat difungsikan lebih dari sekedar medium, tergantung dari penggunanya. Seperti misalnya fenomena aktivisme politik digital sejak Pemilu 2014 di Indonesia. Munculnya akun partai politik, politisi, *buzzer*, serta akun-akun anonim (*bot*) menjadi contoh nyata terjadi pergeseran aktivisme politik konvensional dari yang awalnya kampanye di lapangan terbuka beralih perang narasi melalui media sosial.

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Internet dan Ruang Publik: Representasi Dewa Janus dalam Masyarakat Modern

Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia

(APJII) tahun 2017 disebutkan bahwa penetrasi pengguna Internet di Indonesia meningkat menjadi 143.26 juta jiwa atau setara dengan 54.7 persen dari total populasi negara ini, melampaui Singapura dan Thailand. *The 2018 Global Digital Report* (2018) menyebutkan dalam surveinya bahwa orang Indonesia menghabiskan waktu selama 3 jam 23 menit ‘hanya’ untuk mengakses Internet. Beberapa aktivitas yang sering dilakukan oleh masyarakat ketika menggunakan Internet antara lain mencari informasi/berita, hiburan, mengunggah dan mengunduh video, jual-beli *online*, dan pertemanan sosial (APJII, 2018). Tidak hanya itu, masyarakat mulai melihat bahwa Internet dapat dimanfaatkan sebagai saluran komunikasi politik. Kemunculan Internet dan media sosial dianggap mampu menghadirkan ruang publik baru yang jauh dari kepentingan pemilik modal dan bebas diakses oleh siapa saja (Lim, 201

Gambar 1. Jumlah Pengguna Internet di Indonesia tahun 2018 dan (2) Durasi Penggunaan Internet di Indonesia



Sumber: Hasil Survei WeAreSosial dan Hootsuite, 2018 dan Hasil Survei APJII dan Teknopreneur, 2017

Sejarah panjang mengawali perkembangan Internet di Indonesia yang

awalnya hanya dapat diakses oleh segelintir orang dengan akses yang terbatas. Seiring

waktu, kehadiran internet mulai mendapat perhatian ketika peristiwa jatuhnya rezim Soeharto tahun 1998. Pada rezim Soeharto, Internet dan atribut penghubung (warung internet/warnet) telah menjadi ruang bagi masyarakat kelas menengah Indonesia yang sebelumnya tidak dapat menyuarakan opini/gagasan melalui media *mainstream* (Lim, 2003) dan akhirnya Internet mampu menghadirkan ruang bebas bagi masyarakat sipil untuk menentang kekuasaan negara (Hill & Sen, 2005; Lim, 2006). Dalam sejarah politik Indonesia, Internet telah berperan sebagai “ruang maya sipil” di mana individu dan grup menghasilkan aktivisme *online* secara kolektif dan menerjemahkannya menjadi pergerakan dunia nyata di ranah *offline* (Lim, 2006). Beberapa sifat Internet seperti konvergen, hemat biaya, memiliki ketahanan terhadap upaya kontrol dan sensor, Lim (2003) menyebutkan bahwa Internet adalah ‘medium yang ramah’ (*convival medium*). Dengan demikian, sebagaimana dinyatakan oleh Lim dan Kann bahwa Internet menawarkan ruang luas tak terbatas bagi kebebasan, kemandirian dan kreativitas dibanding dengan media-media sebelumnya (2008, h.82).

Melalui penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa peran Internet dinilai cukup signifikan bagi dinamika politik di Indonesia, khususnya membangun iklim demokrasi yang semakin baik. Ruang yang tak bersekat, akses yang mudah serta murah menjadi keunggulan bagi Internet dibanding media *mainstream* seperti radio, surat kabar, dan televisi. Bahkan, beberapa pengamat media pun menyebutkan bahwa Internet dianggap sebagai ruang publik baru yang fleksibel dan benar-benar bebas dari kekuasaan dominan (Fuchs, 2014; Jati,

2016; Lim, 2012 & 2014). Menyebut internet sebagai ruang publik baru maka kita perlu menilik kembali gagasan Jurgen Habermas tentang apa itu ruang publik. Menurutnya, ruang publik adalah ‘ruang’ yang diciptakan dari kumpulan orang-orang tertentu yang bertujuan untuk membangun sebuah wacana dan sikap atas otoritas publik. Atau dengan kata lain, ruang publik mengacu pada “ruang antara” negara dan pasar di mana segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum dan opini publik dibentuk dengan cara persuasi, konflik, dan didalamnya terjadi perebutan makna (*contested meaning*) untuk memenangkan opini publik (Habermas, 1989).

Dalam tulisan *The Structural Transformation of the Public Sphere*, Habermas menyebutkan bahwa salon dan kedai kopi (*coffee house*) adalah representasi ruang publik di Eropa pada abad ke-16 dan 17. Ia menggambarkan bagaimana kelompok borjuis dengan bebas menyampaikan gagasan dan kritiknya atas kebijakan pemerintah tanpa merasa ditekan atau diawasi. Sebagai penghubung dengan negara, maka tidak heran apabila ruang publik digunakan untuk mendiskusikan segala hal yang mungkin dicapai solusi rasionalnya melalui debat kritis. Konsepsi ruang publik ideal *ala* Habermas mensyaratkan dua hal. Pertama, keterbukaan – yang artinya siapapun boleh terlibat dalam pembentukan ‘ruang’ publik tanpa melihat status sosial/latar belakang. Kedua, terdapat debat rasional/kritis yang setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk saling memengaruhi melalui kekuatan argumentasi mereka.

Ruang publik memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk dapat menyatakan opini-opini,

kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan mereka secara diskursif. Ruang publik tidak hanya sebagai institusi atau organisasi yang legal, melainkan adalah komunikasi antar warga itu sendiri (Hardiman, 2009:128). Memasuki abad ke-20, bentuk ruang publik mulai bergeser, terlebih pasca ditemukannya mesin cetak yang melahirkan media massa, seperti surat kabar, radio, dan televisi. Beberapa akademisi sempat merisaukan masifnya perkembangan media massa karena dianggap mengancam demokrasi dan ruang publik. Ketakutan ini cukup beralasan jika menilik kritik Horkheimer dan Adorno terhadap budaya massa - bahwa budaya yang dimediasi dan diproduksi secara massal akan menjadi dominasi ideologis ketimbang sebagai ruang publik. Kemampuan propaganda media massa yang bagus akhirnya dapat mengubahnya menjadi lembaga pemerintah yang berita/informasi akan dikuasai dan diawasi. Alih-alih bersikap pesimis, Habermas nyatanya mendukung kehadiran media massa modern berpotensi menjadi ruang publik baru yang mampu mendukung iklim demokrasi.

Imajinasi ruang publik yang dikemukakan Habermas ternyata tidak hanya ditemukan di Eropa melalui salon dan *coffee house*. Salah seorang ahli politik Amerika yang juga Indonesianis, Benedict Anderson, dalam bukunya *Imagined Communities* (2006), menyebutkan bahwa kapitalisme cetak, media cetak memungkinkan kaum nasionalis menggencarkan konsep persatuan “Indonesia” sebagai suatu negara-bangsa (*state-nation*), meski hanya segelintir kecil minoritas berdaya yang melek huruf dan bisa membacanya. Sejak saat itu, media massa *mainstream* menjadi medium yang

cukup baik dalam merawat demokrasi di Indonesia. Namun, kondisi tersebut berubah ketika Internet mulai hadir ke dalam aktivitas keseharian masyarakat. Menyitir pendapat dari Silih Agung Wasesa bahwa kehadiran media baru berbasis digital membuat informasi politik tidak hanya semakin masif, tetapi juga terdistribusi dengan cepat dan bersifat interaktif.

Seperti pendapat Habermas ketika mengomentari ihwal media massa modern sebagai ruang publik baru, begitu juga dengan Internet. Kebebasan, kecepatan serta keluasan jangkauan Internet membuat akademisi perlu mendefinisikan kembali makna ruang publik di era digital. Terminologi ‘ruang’ yang awalnya mengarah pada kondisi fisik, seperti *coffee house* dan salon yang digunakan untuk berdiskusi tentang wacana tertentu, sekarang mulai bergeser. Ruang dalam Internet, bersifat maya, tidak tampak wujud fisiknya namun wacana/diskursus dapat terus hidup laiknya perdebatan di salon atau *coffee house*. Istilah lain dari ruang publik maya ini yaitu *cyberspace*. Apa sebenarnya *cyberspace* itu? Mengutip tulisan Yasraf Amir Piliang (2011) dijelaskan bahwa *cyberspace* adalah ruang yang terbentuk oleh sistem kendali informasi dan data, dimana di dalamnya setiap orang menavigasikan dirinya sendiri dalam realitas virtual. Dalam ruang tersebut semua orang dapat saling memberikan informasi dan menanggapi (berdiskusi) tanpa perlu menunggu orang yang berdiskusi hadir tatap muka dengan kita atau mungkin tanpa perlu menanyakan latar belakang sosialnya.

*Cyberspace* memiliki kemampuan untuk memperdalam nilai-nilai deliberatif dalam demokrasi seperti *voluntarism*, *egalitarian* dan *networking* yang tercermin

dalam aktivitas penerimaan dan penyebaran informasi/berita. Masyarakat dengan mudah dan cepat dapat membentuk *peer group* berdasarkan kesamaan minat maupun isu tertentu. Selain itu, suara minoritas yang selama ini tidak mendapat tempat atau tidak didengar di media *mainstream* memiliki kesempatan untuk mengartikulasikan kepentingan dan identitasnya melalui Internet (Mitra, 2014). Namun ternyata, dari sekian kelebihan yang dimiliki *cyberspace*, terdapat kekurangan yang dianggap dapat mengancam kebebasan berpendapat dan demokrasi, yaitu munculnya *fake news* yang berimplikasi pada kondisi demokrasi palsu (*fake democracy*) (Global Asia, 2017; Paladino, 2018; Raini, Anderson & Albright, 2017; Tapsell, 2017). Tidak cukup sampai disitu, hasil riset yang dilakukan oleh Perbawani, Rahayu & Ashari (2018) menemukan bahwa kebebasan yang ditawarkan oleh Internet memicu munculnya anonimitas dari pengguna yang berimplikasi pada rendahnya tanggung jawab pengguna ketika menyebarluaskan informasi politik. Pendapat berbeda disampaikan oleh Asenbaum (2018) dalam artikel yang berjudul *Anonymity and Democracy: Absence as Presence in the Public Sphere*, ia menganggap bahwa anonimitas dalam *cyberspace* itu penting untuk menjaga kebebasan berpendapat warga serta melindungi identitas pengguna dari tekanan penguasa.

## 2. Kemenangan Obama hingga Fenomena Dis-Informasi dalam Lanskap Komunikasi Politik

Dalam beberapa tahun terakhir, telah banyak riset dan publikasi yang melihat adanya keterhubungan antara aktivitas politik, khususnya partisipasi

politik masyarakat umum dengan kehadiran Internet sebagai implikasi dari perkembangan teknologi (Bimber, 2001; Castells, 1997; Davis, 1999; van de Donk *et al.* 2004; Norris, 2001 & 2002; Sunstein, 2003). Akademisi dan praktisi politik menyepakati bahwa Internet membawa model komunikasi politik baru, lebih interaktif dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Indikasi awal dampak Internet dalam politik demokrasi konvensional terungkap dalam peran media sosial dalam artikulasi dan mobilisasi kepentingan politik dalam kemenangan Barack Obama dalam pemilihan presiden Amerika 2008 dan 2012. Tim kampanye Obama menyiapkan infrastruktur kampanye digital melalui situs jejaring sosial *myBarackObama.com* dengan sangat baik sehingga mampu merangkul pendukung Obama untuk menjadi relawan politik. Meskipun model kampanye digital Obama ini bukan yang pertama, namun keberhasilan tim kampanye mengemas pesan politik menjadi lebih populer sehingga berhasil menumbuhkan partisipasi dan efikasi politik patut diacungi jempol.

Di Indonesia sendiri, fenomena penggunaan Internet sebagai medium komunikasi politik pernah dilakukan oleh pasangan Joko Widodo (Jokowi) – Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) ketika berlaga dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Media sosial dipilih oleh tim kampanye Jokowi dan Ahok untuk meraih dukungan dari generasi muda (*millennial*) serta meminta kesediaan mereka menjadi relawan politik di media sosial. Sebagai bentuk nyata dari keterlibatan *warganet* dalam pusran kampanye Jokowi – Ahok, Kartika Djoemadi membentuk kelompok relawan yang berbasis daring dengan nama Jokowi Ahok Social Media Volunteer (JASMEV)

pada tanggal 12 Agustus 2012. JASMEV ini memiliki tugas yaitu untuk menghimpun dan mengkoordinir para relawan di media sosial agar lebih efektif dan efisien dalam mendukung pasangan Jokowi-Ahok dengan cara menyampaikan informasi yang positif dan elegan (Utomo, 2013). Keberadaan JASMEV ini menunjukkan bagaimana pengguna Internet (warganet) berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik. Partisipasi warganet ditunjukkan melalui aktivitas *buzz* dan *mention* positif dari 900 ribu akun berbeda dengan target capaian pesan tentang Jokowi-Ahok sebanyak 2 juta pesan.

Kedua contoh di atas adalah penggambaran bagaimana Internet dan media sosial memiliki peran aktif dalam menumbuhkan kesadaran berpolitik serta partisipasi politik warga, khususnya yang dibangun oleh warganet. Siregar (2015) menyebutkan dalam tulisannya bahwa kehadiran Internet/media sosial memang berkontribusi positif terhadap proses demokrasi dan deliberasi di Indonesia. Menurutnya, Internet/media sosial memungkinkan setiap warga untuk bertindak sebagai subjek yang mandiri dan autentik serta secara partisipatoris terlibat dalam proses pencarian, penyebaran, dan pertukaran informasi. Sayangnya, praktik kemerdekaan berpendapat dan berkespresi di media sosial belum dibarengi dengan etika dan penghormatan terhadap hak orang lain dalam mengakses informasi. Salah satu dampak negatif dari praktik berekspresi yang kebablasan adalah fenomena *fake news* dan *hoax*. Kedua fenomena ini dinilai dapat mengancam stabilitas demokrasi di Indonesia (Kompas, 11 Januari 2017).

Ross Tapsell dalam tulisannya *Disinformation and Democracy in Indonesia* (2018) dengan gamblang menjelaskan

bahwa fenomena penyebaran informasi palsu, atau lebih tepat disebut dengan dis-informasi dalam konteks politik di Indonesia sebenarnya tidak hanya berasal dari media *online*. Di era kepemimpinan Soeharto, praktik dis-informasi juga terjadi namun dengan pengertian dan sirkulasi yang berbeda (menggunakan komunikasi tatap-muka dan media massa *mainstream*). Menurutnya, fenomena dis-informasi yang terjadi saat ini dikarenakan warga kehilangan kepercayaan terhadap media arus utama dan pemerintah juga tidak menyediakan saluran-saluran informasi alternatif, sehingga warganet tidak mendapatkan petunjuk mana informasi yang benar dan salah. Ketidaktahuan serta kebingungan warganet dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang ingin meraup keuntungan dari praktik dis-informasi tersebut. Salah satu kelompok yang berhasil ditangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia, yaitu *Saracen* dan *Muslim Cyber Army* (MCA). Kedua kelompok ini didakwa sebagai ‘pabrik informasi palsu’ dengan omzet per bulan mencapai 100 juta rupiah (Chan, 2017).

Hasil penelusuran penulis, kemunculan *cybertroops* ala Indonesia, seperti *Muslim Cyber Army* (MCA) dan *Saracen* lebih didorong karena sentimen agama yang kasusnya menimpa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama, atau Ahok. Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh SafeNet Voice Indonesia tahun 2018 ditemukan bahwa usai aksi demo bela Islam (411 dan 212), ada pertemuan yang melibatkan sejumlah pegiat media sosial untuk membantu ‘kinerja’ dari MCA di kota masing-masing sepulang dari aksi besar-besaran dan dilakukan secara berjejaring. Melalui teknik analisis pesan

informasi dari akun-akun MCA didapatkan gambaran utuh bahwa ketika berbicara mengenai MCA saat ini bukanlah entitas yang sifatnya tunggal. Banyak pihak yang memakai identitas MCA dan terdapat banyak kepentingan sosial-politik yang terlibat. Namun demikian, isu sosial-politik yang diusung tidak bisa dilepaskan dari figur Joko Widodo sebagai pemimpin nasional.

Fenomena dis-informasi yang digawangi oleh kelompok *Saracen* dan MCA adalah salah satu bukti bahwa kebebasan akses informasi melalui Internet/media sosial tidak hanya membawa dampak positif, namun juga menyisakan persoalan yang cukup pelik bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Mengutip hasil penelitian *Oxford Internet Institute* tahun 2017 dijelaskan bahwa arus informasi palsu (*fake news* atau *hoax*) semakin tinggi frekuensinya di media sosial dikarenakan banyaknya akun-akun *bot* yang sengaja dibayar oleh kelompok tertentu, atau bahkan pemerintah untuk mengedarkan informasi palsu yang dimaksud. Alcott dan Gentzkow (2017) mencatat dalam temuan penelitiannya bahwa ada dua motif yang cukup kuat dari akun-akun *bot* ketika menyebarkan informasi palsu, pertama adalah motif ekonomi, kedua adalah motif ideologis. Menurut penulis, kedua motif ini sesuai dengan ekosistem informasi di Indonesia, yang sejak tahun 2014 praktik dis-informasi seakan sulit dibendung.

Lembaga riset *Oxford Internet Institute* (2017) mencatat dalam hasil risetnya bahwa peredaran informasi palsu ternyata tidak hanya dilakukan oleh satu orang/kelompok, melainkan melibatkan partai politik, politisi, pemerintah, dan *paid*

*citizens*. Keterlibatan pemerintah dengan tentara digitalnya (*cybertroops*) semakin memperkeruh ekosistem informasi sebuah negara. Hal ini dirasa masuk akal karena pemerintah memiliki akses terhadap infrastruktur informasi yang memudahkan untuk memengaruhi publik melalui konten yang dibuat. *Cybertroops* beroperasi layaknya tentara di medan perang, membombardir media sosial dengan pesan-pesan yang sarkas, satir dan menyudutkan pihak-pihak tertentu dengan tujuan akhir menguasai wacana publik. Lalu bagaimana dengan *paid citizens*? Mereka adalah warga negara yang secara aktif direkrut oleh pemerintah dan dibayar dengan perjanjian tertentu sesuai dengan tugas mereka. *Paid citizens* bukan pegawai resmi pemerintah yang bekerja di layanan publik, bukan pula karyawan perusahaan yang bekerja di divisi strategi media sosial. Hemat kami, *paid citizens* ini adalah warga negara yang memiliki posisi terkemuka di masyarakat (*offline/online*). Dalam konteks Indonesia, *paid citizens* dikenal dengan *buzzer politik*. Sebagai contoh, di India, warga secara aktif direkrut oleh tim pasukan dunia maya untuk membantu menyebarkan ideologi dan pesan politik (Kohlil, 2013). Keikutsertaan warga negara yang tidak secara resmi berafiliasi dengan pemerintah atau partai politik seolah menampilkan ‘suara independen’ mereka sehingga dapat digunakan untuk membantu menyebarkan pesan dari perspektif yang nampaknya netral.

Keberadaan tentara digital, atau *cybertroops* secara umum disyaratkan memiliki keahlian di bidang strategi komunikasi dengan membuat konten-konten substantif dan berbicara dengan bahasa publik agar propaganda yang disampaikan tepat sasaran. Bahkan, menurut Bradshaw

dan Howard (2017) tentara siber sering terlibat dalam kegiatan pengembangan kapasitas yang terdiri dari (1) pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan dan kemampuan yang terkait dengan produksi dan penyebaran propaganda; (2) memberikan *reward* bagi individu yang memiliki kinerja sangat baik; (3) berinvestasi dan proyek penelitian dan pengembangan. Sebagai contoh, di Rusia, guru bahasa Inggris diberikan pelatihan untuk mengajar tata bahasa yang tepat ketika berkomunikasi dengan audiens (khususnya warga yang menggunakan bahasa Inggris) di media sosial (Seddon, 2014). Di Azerbaijan, kelompok pemuda diberikan pelatihan media sosial untuk membantu mengaktifkan situs *microblogging* mereka supaya lebih efektif dalam menjangkau audiens yang diinginkan. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa pengguna Internet/media sosial (warga-net) memiliki posisi penting dalam sirkulasi informasi kepada khalayak luas.

### **3. Diskusi: Tantangan dan Praktik Demokrasi Digital**

Evolusi teknologi informasi dan komunikasi turut menyumbangkan perubahan pada dunia politik, khususnya perubahan dalam praktik demokrasi. Seperti yang disampaikan oleh Jay G. Blumler dan Dennis Kavanagh (1999) dalam tulisannya yang berjudul *The Third of Political Communication: Influences and Features*, era komunikasi politik yang hanya mengandalkan media massa konvensional, seperti radio, televisi dan surat kabar sudah mulai ditinggalkan oleh politisi, partai politik dan warga sipil. Saat ini, partai politik, politisi, dan warga lebih memilih menggunakan Internet sebagai saluran

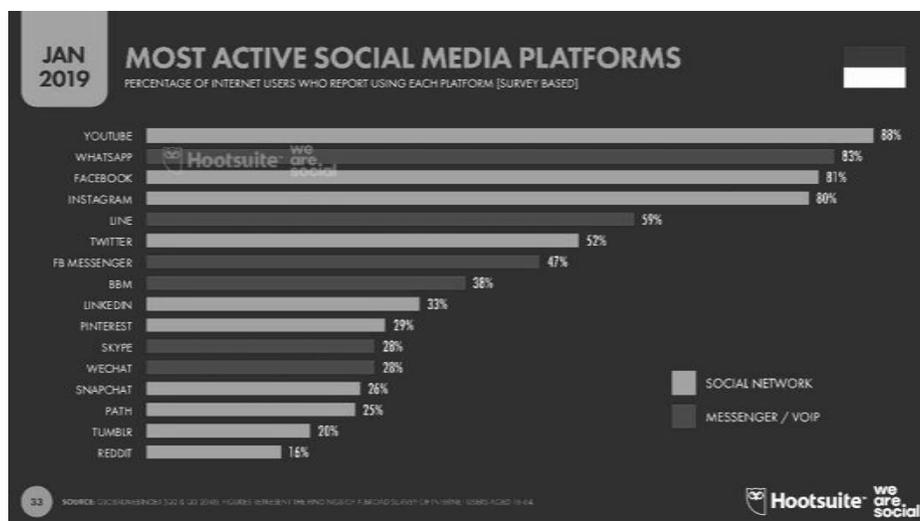
komunikasi politik. Hal ini dirasa cukup beralasan karena Internet mampu menyediakan ruang komunikasi dua arah (interaktif) yang tidak dapat dipenuhi oleh media massa konvensional. Kehadiran Internet juga memicu perubahan praktik partisipasi politik, yang selama ini mensyaratkan kehadiran fisik (*offline*) dari aktor politik mulai bergeser dengan mengandalkan riuhnya kicauan *tweet*, unggahan di Facebook, dan Instagram. Sejumlah penelitian yang membahas tentang sejauh mana peran Internet dalam memfasilitasi partisipasi politik masyarakat juga semakin banyak dilakukan (Best & Krueger, 2005; Bimber, 2000; Bucy & Gregson, 2001; de Zúñiga, Puig-i-Abril, & Rojas, 2009; McLeod, Scheufele, & Moy, 1999; Rojas & Puig-i-Abril, 2009; W. Zhang, Johnson, Seltzer, & Bichard, 2010). Meskipun di satu sisi, beberapa akademisi masih meragukan kemampuan Internet (media sosial) sebagai agen perubahan dalam komunikasi politik (Papacharissi, 2002), terlebih temuan penelitian dari Lim (2012) bahwa konteks dan susunan kemasyarakatan di sekitar teknologi-lah yang menentukan sejauh mana teknologi tersebut berdampak dalam aktivitas politik, namun transformasi komunikasi politik dengan hadirnya Internet/media sosial tidak dapat dihindari.

Era masyarakat informasi tidak hanya mengusung nilai-nilai kemanusiaan yang baru, namun juga formulasi dan level baru demokrasi. Sebagai pokok pembahasan dalam tulisan ini, penulis merujuk terminologi demokrasi digital yang dicetuskan oleh Diana Saco. Dalam bukunya yang berjudul *Cybering Democracy: Public Space and the Internet*, ia mengungkapkan bahwa internet saat ini dianggap memiliki

kriteria dari konsep demokrasi langsung, terutama dengan semakin luasnya konsep partisipasi politik yang tidak hanya mengandalkan ruang lingkup kecil (interaksi satu individu dengan yang lain), melainkan dengan publik yang lebih luas. Definisi lain disampaikan pula oleh Castells (1997) bahwa demokrasi digital merangkai interaksi antara publik, partai politik, pemerintah, pelaku bisnis, masyarakat lokal, dan jaringan sosial. Castell menyebutnya sebagai interaksi dialektis antara teknologi dan masyarakat. Alexander & Pal (1998) memberikan penjelasan yang lebih luas tentang demokrasi digital dengan memasukkan konsep demokrasi perwakilan dan demokrasi partisipatif. Maka untuk merangkum definisi tersebut, penulis menambahkan gagasan F. Budi Hardiman (2009) tentang demokrasi deliberatif yang bertujuan untuk meningkatkan intensitas partisipasi warga negara dalam proses pembentukan aspirasi dan opini agar kebijakan yang dihasilkan mendekati apa

yang diinginkan publik. Ruang digital semacam Internet dan media sosial dirasa memiliki kemampuan untuk menciptakan deliberasi demokrasi tersebut.

Gagasan Habermas tentang ruang publik yang bebas dari dominasi penguasa sepertinya memang layak disematkan pada Internet. Ruang publik yang didefinisikan sebagai ruang yang mudah diakses, bebas dari tekanan negara dan ekonomi, sehingga warga negara bebas melakukan pembicaraan politik guna mewujudkan suatu kesepakatan bersama terkait kepentingan umum yang lebih luas dapat ditemukan dengan mudah di Indonesia. Hasil survei terbaru dari *WeAreSocial* dan *HootSuite* bulan Januari tahun 2019 menunjukkan bahwa warga-net Indonesia benar-benar serius memanfaatkan keberadaan Internet dan media sosial. Dalam infografis tersebut menampilkan setidaknya ada empat *platform* dengan jumlah pengguna tertinggi, yaitu *YouTube*, *WhatsApp*, *Facebook*, dan *Instagram*.



Gambar 3. Infografis Persentase Platform Media Sosial paling aktif di Indonesia  
Sumber: Hasil survei dari *WeAreSocial* dan *HootSuite*, 2019

Dengan menilik infografis hasil survei di atas, dapat diartikan bahwa Internet menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia. Warga-net, atau yang biasa disebut *netizen* merasa bahwa saluran komunikasi yang bebas dari dominasi ekonomi dan penguasa adalah Internet dan media sosial. Internet mampu membangkitkan bentuk-bentuk partisipasi baru dalam kehidupan bermasyarakat, seperti mendorong adanya pertukaran gagasan yang lebih mencerahkan, mengubah debat-debat politik, melakukan perubahan sosial-kemasyarakatan, dan mereformasi sistem politik (Kamarck & Nye, 1999; Rheingold, 2002; Kahn & Kellner, 2004; Shirky, 2011).

Terlebih dengan jumlah pengguna Internet tahun 2017 yang didominasi oleh rentang usia 19-34 tahun (49.52%) dan usia 35-54 tahun (39.55%) menunjukkan bahwa Internet memiliki potensi yang besar menjadi ruang publik baru di Indonesia. Jumlah pengguna Internet yang mayoritas berusia muda sangat memungkinkan terlibat dalam partisipasi politik di dunia digital. Seperti yang disampaikan oleh Almond & Verba (1965) setidaknya ada lima faktor yang dapat memberikan dorongan terhadap keinginan warga negara untuk berpartisipasi, yaitu (1) modernisasi; (2) pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern; (3) keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan ekonomi, sosial, ekonomi, dan kerakyatan; (4) perubahan struktur kelas sosial; (5) konflik diantara kelompok-kelompok pemimpin politik. Apa dan bagaimana bentuk partisipasi politik itu? Sidney Verba, salah satu ilmuwan politik yang baru saja meninggal di Bulan Maret 2019 ini menjelaskan dalam karyanya

bahwa partisipasi politik adalah upaya warga negara baik individu maupun kelompok untuk ikut serta memengaruhi pembentukan kebijakan publik dalam sebuah negara. Sedangkan bentuk partisipasi politik bermacam-macam, antara lain mengikuti pemilihan umum, demonstrasi ke jalan, mengikuti kampanye politik, dan yang terbaru mengunggah konten yang bermuatan politik ke Internet/media sosial (Delli Carpini, 2004).

Membahas partisipasi politik, Internet memiliki dua sisi, kelebihan dan kelemahan. Menurut Papacharissi (2010), teknologi informasi dapat meningkatkan potensi untuk berpartisipasi dalam debat politik, tetapi faktanya, warga-net lebih memilih menjadi konsumen informasi daripada menghasilkan informasi, wacana, diskursus politik (Curtice & Norris, 2004). Salah satu dampaknya adalah, munculnya informasi palsu (*dis-informasi*, *fake news*, *hoax*) dan bahkan ujaran kebencian. Fakta ini salah satunya didorong oleh rendahnya sensitivitas warga-net atas kebenaran dari sebuah informasi atau berita, malas untuk melakukan *fact checking* sehingga setiap informasi/berita yang diterima begitu saja dan malah disebarluaskan ke lingkaran pertemanan yang lebih luas. Belum lagi permasalahan terkait dengan anonimitas di Internet.

Lalu bagaimana dengan praktik demokrasi digital di Indonesia? Sebenarnya praktik demokrasi digital di Indonesia telah lama diketahui dan dilakukan oleh warga-net, ketika tahun 2012 seorang perempuan bernama Prita Mulyasari melayangkan protes kepada RS Omnia atas dugaan malpraktik yang dilakukan oleh rumah sakit kepada anaknya. Bukannya meminta maaf,

RS Omnia malah menggugat balik Prita dengan dalil pencemaran nama baik. Sesaat setelah perselisihan antara Prita dengan RS Omnia terunggah ke media sosial, langsung saja warga-net melakukan aksi solidaritas yang dikenal dengan *#KoinUntukPrita*. Gerakan ini diinisiasi oleh kelompok perempuan melalui *Facebook* dan pada akhirnya terjadi aksi turun ke jalan. Akhir dari kasus ini yaitu Prita Mulyasari dinyatakan tidak bersalah. Selain Prita, ada aktivisme digital lain yang juga terjadi di ruang virtual, yaitu *Gerakan Cicak vs Buaya*. Gerakan ini merupakan aksi solidaritas yang digalang oleh warga-net untuk menentang kriminalisasi terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Riyanto. Aksi ini mirip dengan kasus Prita, gerakan sosial yang dilakukan tidak hanya melalui media sosial tetapi juga massa menggelar aksi di depan kantor KPK (Nasution, 2010).

Melalui kedua contoh di atas terlihat bahwa masyarakat Indonesia memang telah memosisikan Internet dan media sosial sebagai ruang-ruang deliberasi dimana persoalan representasi fisik individu tidak lagi menjadi persyaratan utama dalam menunjukkan partisipasi politiknya. Sebagaimana yang disimpulkan Saco (2002) bahwa kehadiran secara fisik bukan hal yang diperlukan dalam partisipasi. Namun, ketika kehadiran fisik tidak menjadi pra-syarat dalam ruang deliberasi digital, muncul persoalan baru yaitu anonimitas pengguna. Menurut Asenbaum (2018) anonimitas di era informasi tidak hanya persoalan privasi pengguna melainkan juga sebagai bentuk ekspresi demokratis dari subjek, yang tak lain adalah warga-net. Selama ini, warga-net beranggapan bahwa anonimitas dalam ruang

digital adalah sebuah ‘anugerah’ untuk melindungi hak berpendapat mereka, faktanya tidak demikian. Bentuk kekhawatiran anonimitas di Internet yaitu munculnya argumen-argumen yang tidak dibangun berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Informasi/berita yang disebarluaskan terkadang berasal dari sumber yang tidak kredibel, bahkan tak jarang sulit untuk ditelusuri keberadaannya. Diskusi politik yang terbentuk juga jauh dari nilai-nilai kepublikan sebagaimana yang disampaikan oleh Habermas (1996: 303) terutama dimensi kesetaraan (*equality*) dan komunikasi yang berorientasi pada konsensus.

Pelanggaran prinsip kesetaraan mengemuka dalam isu-isu irasional seperti dukungan kelompok agama mayoritas sebagai komunikator dominan, isu identitas yang memarjinalkan etnis tertentu serta tampilan fisik calon presiden yang berakhir dengan produksi dan penyebarluasan konten ujaran kebencian (Hasfi, Usmand & Santosa, 2017). Media sosial yang seharusnya memberikan ruang deliberatif justru difungsikan sebagai ruang penyemaian benih konflik dengan bersumber pada isu-isu ras, agama, dan etnisitas. Kondisi demikian telah kita temui sejak tahun 2014 ketika pemilihan presiden dan tahun 2016 saat Pilkada DKI Jakarta yang mendorong terciptanya mobilisasi massa yang mengatasnamakan Islam, *Aksi Bela Islam*.

Pada tahun 2014 ketika masyarakat mulai aktif menggunakan Internet dan media sosial penulis mendapati bentuk partisipasi politik di ruang-ruang virtual, seperti *Facebook*, *Twitter* dan *YouTube* baik dalam bentuk cuitan (*twitter*) maupun video kampanye politik kreatif (*YouTube*).

Proyeksi politik digital tersebut semakin terasa pasca kemenangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, saat itulah masyarakat Indonesia (warga-net) mulai gencar menggunakan Internet/media sosial sebagai media komunikasi politik serta ruang diskusi politik yang bebas. Namun, iklim kebebasan dalam ruang digital ternyata tak selamanya dimanfaatkan dengan baik oleh warga-net, pada tahun 2016 ketika Pilkada DKI Jakarta berlangsung, ruang publik digital mulai tercemar dengan praktik disinformasi yang dilakukan kelompok bernama *Muslim Cyber Army* (MCA) dan *Saracen*. Keduanya terbukti menyebarkan informasi/berita palsu dan ujaran kebencian terhadap aktor politik tertentu dengan tujuan menumbuhkan kebencian virtual baik *offline* maupun *online*. Meskipun pada akhirnya kedua kelompok ini berhasil diamankan oleh Kepolisian, namun jejak informasi yang mereka sebarkan berhasil memunculkan polarisasi di masyarakat (<https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/indonesian-police-uncover-fake-news-factory>, akses 19 Februari 2019).

Memasuki masa pemilu di tahun 2019, partisipasi politik melalui ruang virtual semakin terasa. Selain fenomena *hoax*, *fake news* dan ujaran kebencian, banyak juga warga-net yang mencoba membangun diskursus politik meskipun tujuannya bukan pada konsensus, melainkan

amplifikasi pesan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Lim (2013) bahwa *netizen* Indonesia memang banyak melakukan ‘klik digital’ atau *slactivism*, namun minim perdebatan konten. Tidak hanya itu, sifat informasi di Internet/media sosial yang terpotong-potong, sensasional dan berisi cuplikan-cuplikan semakin mempertegas proses amplifikasi pesan tersebut. Belum lagi, Internet yang dianggap bebas dari intervensi dan kontrol negara tercemar oleh omong kosong para elit politik. Bentuk nyata bagaimana kotornya ruang publik digital adalah ketika terjadi penangkapan Andi Arief yang merupakan elit Partai Demokrat dalam kasus Narkoba. Tidak perlu waktu lama, informasi penangkapan tersebut beredar di *Twitter* dan langsung dikomentari oleh akun @GunRomli, anggota Partai Solidaritas Indonesia (pro-pemerintah). Isi cuitannya menunjukkan degradasi etika politik dengan menganggap kasus Narkoba sebagai salah satu ‘strategi’ meningkatkan elektabilitas partai. Ruhnya ruang publik digital dengan konten dari elit politik yang berprinsip lawan politik adalah musuh (rivalitas), semakin menjerumuskan logika warga-net ke dalam polarisasi kepentingan. Terlebih lagi, kesalehan politik yang diumbar melalui fatwa, dalil dari pemuka agama, seolah Tuhan turut serta dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia (Hosen, 2019).



Gambar 4. Tangkapan layar cuitan Twitter Mohamad Guntur Romli (@GunRomli)  
Sumber: Dokumentasi peneliti, 2019

Prospek dan tantangan demokrasi digital di Indonesia berjalan beriringan. Wilhelm (2003) mengajukan beberapa pandangan menghadapi demokrasi digital, yaitu (1) ketersediaan infrastruktur yang bisa memacu spirit publik untuk melakukan partisipasi politik; (2) memastikan bahwa informasi dapat diakses oleh semua pengguna, termasuk kelompok marjinal yang nyatanya masih belum terfasilitasi; (3) pemeliharaan kualitas diskusi dalam masyarakat jaringan *ala* Castells; (4) hilangnya ruang publik di bawah tekanan kekuatan pasar yang mendominasi. Keempat tantangan ini menjadi pekerjaan rumah warga-net Indonesia, mengingat pluralisme pengguna dan sirkulasi informasi yang semakin meningkat.

Sebagai penutup dari pembahasan ini, penulis menawarkan pandangan bagaimana seharusnya pemerintah (*state*) mendorong terciptanya partisipasi politik melalui ruang publik digital yang sehat. Dalam sistem demokrasi yang penyelenggaranya bertumpu pada partisipasi publik maka kehadiran negara dirasa sangat

penting. Kehadiran yang dimaksud bukan dalam bentuk pengekanan, dominasi atau intervensi, melainkan perlindungan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat yang dilindungi oleh undang-undang. Keberadaan media *mainstream* (surat kabar, radio, dan televisi) diaktifkan kembali sebagai pembentuk opini publik, sehingga praktik dis-informasi juga dapat diminimalisir oleh warga-net sendiri.

#### D. KESIMPULAN

Awalnya kehadiran Internet dan media sosial berfungsi sebagai ruang kebebasan dalam menyampaikan pendapat dengan kontrol sosial diperankan oleh warga-net. Namun seiring perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin deras, ruang publik yang berwujud digital tidak lagi bersih selayaknya pertama kali muncul. Supaya ruang tersebut dapat memberikan kontribusi pada demokrasi, maka proses deliberasi harus terjadi melalui perbincangan politik (*political talk*). Perbincangan dalam ruang publik digital

harus berdasarkan tindakan komunikatif masing-masing individu yang terlibat secara rasional. Habermas (1984) menjelaskan perbincangan dalam ruang publik ideal perlu mencerminkan kriteria-kriteria sebagai berikut (1) kelengkapan (*comprehensibility*); (2) kebenaran (*truth*); (3) kondisi yang sebenarnya (*truthfulness*); dan (4) kesesuaian (*rightness*).

Berdasarkan paparan kasus di atas, penulis mencoba mengusulkan beberapa saran terkait bagaimana merawat kewarasan warga-net ketika memproduksi maupun menerima informasi politik. Pertama, menciptakan diskusi antar elit politik secara *offline* maupun *online* dengan tidak melibatkan anonimitas untuk mencapai kekuasaan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas haruslah menjadi dasar ketika melakukan diskusi maupun perdebatan dalam ruang digital. Kedua, meningkatkan kesadaran *check and balance* diantara warga-net guna menekan peredaran informasi palsu, *hoax* dan ujaran kebencian. Kemampuan literasi warga-net dalam membedakan anonimitas dalam Internet/media sosial dibutuhkan untuk menyeimbangkan narasi penguasa dan alat kekuasaan politik. Ketiga, meningkatkan daya kritis warga-net dalam mengonsumsi konten akun anonim terutama menjelang pemilu.

#### DAFTAR PUSTAKA

Anggoro, A Sapto. 2012. Detikcom: Legenda Media Online. Yogyakarta: MocoMedia.

Alexander, C.J. & Pal, L.A. (1998). Digital democracy: Policy and politics in

the wired world. United Kingdom: Oxford University Press.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia [APJII]. (2017). Profil Pengguna Internet Indonesia. Jakarta: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.

Arnstein, Sherry R.(1969) 'A Ladder Of Citizen Participation', Journal of the American Planning Association, 35: 4, 216 — 224.

ASEAN Focus. (2018). Social media in Southeast Asia. Singapore: ISEAS-Yusof Ishak Institute.

Asenbaum, H. (2018). Anonymity and Democracy: Absence as Presence in the Public Sphere. *American Political Science Review*, 112(3), 459-472. doi:10.1017/S0003055418000163.

Bimber, B. (1999). The Internet and citizen communication with government: Does the medium matter?. *Political Communication*, 16(4), 409–428.

Bugeja, M. (2017). Interpersonal Divide in the Age of Machine. Cambridge: Oxford University Press.

Castells, M. (2001). *The internet galaxy*. Oxford: Oxford University Press.

Castells, M. (2010). The rise of the network society. United Kingdom: Wiley-Blackwell Publishing.

Delli Carpini, M. X., Cook, F. L., & Jacobs, L. R. (2004). Public deliberation, discursive participation, and

- citizen engagement: A review of the empirical literature. *Annual Review of Political Science*, 7, 315-344.
- Habermas, J. (1989). The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society. Cambridge: Polity Press.
- Hague, B.N. & Loader, B.D. (1999). Digital democracy: Discourse and decision making in the information age. New York: Routledge.
- Hardiman, F.B. (2009). Demokrasi deliberatif: Menimbang 'negara hukum' dan 'ruang publik' dalam teori diskursus Jurgen Habermas. Yogyakarta: Kanisius.
- Hasfi, N., Usmand, S. & Santosa, H.P. (2017). Anonimitas di Media sosial: Sarana kebebasan berekspresi atau patologi demokrasi?, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15(1), 28-38.
- Kamarck, E., and J. Nye. (1999). Democracy.com? Governance in a Networked World. Hollis: Hollis Publishing.
- Lim, M. (2003). From *War-net* to Net-war: The Internet and Resistance Identities in Indonesia, *International Information & Library Review*, 35:2-4, 233-248, DOI: [10.1080/10572317.2003.10762603](https://doi.org/10.1080/10572317.2003.10762603)
- Lim, M. (2005). *@rchipelago online. The internet and political activism in Indonesia*. Enschede: University of Twente.
- Lim, M. (2006). Cyber-urban activism and political change in Indonesia, *Eastbound* (1), 1-19.
- Lim, M. & Padawangi, R. (2008). Contesting alun-alun: Power relations, identities and the production of urban space in Bandung, Indonesia, *International Development Planning Review*, 30(3), 307-326.
- Lim, M. (2012), Clicks, Cabs, and Coffee Houses: Social Media and Oppositional Movements in Egypt, 2004–2011. *Journal of Communication*, 62: 231-248. doi:[10.1111/j.1460-2466.2012.01628.x](https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2012.01628.x)
- Lim, M. (2012). Clicks, Cabs, Coffee Houses: Social Media and Oppositional Movements in Egypt (2004–2011). *Journal of Communication* 62 (2): 231–248.
- Marcus, D.L. (1999). Indonesia revolt was net driven, dalam E. Aspinall, H. Feith dan G. Van Klinken (eds.), *The Last Days of Presidential Suharto*. Clayton: Monash Asia Institute.
- Margianto, J.J. & Syaefullah, A. (2012). Media online: Antara pembaca, laba, dan etika. Problematika praktik jurnalisme online di Indonesia. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Ford Foundation.
- Mitra, A. (2004). Voices of the Marginalized on the Internet: examples from a website for women of South Asia. *Journal of*

- Communication*, 54: 492-510.  
doi:[10.1111/j.1460-2466.2004.tb02641.x](https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2004.tb02641.x)
- Nasrullah, R. (2012). Internet dan ruang publik virtual: Sebuah refleksi atas teori ruang publik Habermas. *Jurnal Komunikator*, 4(1), hal. 33-46.
- Norris, P., Curtice, J. (2008). Getting the Message Out: A two-step model of the role of the Internet in campaign communication flows during the 2005 British General Election. *Journal of Information Technology & Politics* 4(4):3-13.
- Papacharissi, Z. (2002). The virtual sphere: The Internet as a Public Sphere. *New Media & Society*, 4(1), 9-27.
- Papacharissi, Z. (2010). A Private Sphere: Democracy in A Digital Age. Cambridge: Polity Press.
- Savigny, H. (2002), Public Opinion, Political Communication and the Internet. *Politics*, 22: 1-8. doi:[10.1111/1467-9256.00152](https://doi.org/10.1111/1467-9256.00152)
- Schultz, J. (1998). *Reviving the fourth estate: Democracy, Accountability and the Media*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Van Dijk, J. (2006). *The network society*. London: SAGE Publications.
- Wilhem, Anthony G. 2000. Demokrasi Di Era Digital : Tantangan Kehidupan Politik di Ruang Cyber. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sumber Digital:**
- <https://nasional.kompas.com/read/2010/06/15/08061335/Kontroversi.Kasus.Bibit-Chandra.-3>, diakses pada 15 Februari 2019 pukul 10.15 WIB.
- <https://www.insideindonesia.org/god-in-the-indonesian-elections>, diakses pada 9 Maret 2019 pukul 16.42 WIB.
- Camp, Jeand and Chien, Y.T. (2000). *The internet as public space: concepts, issues, and implications in public policy*, dalam jurnal *ACM SIGCAS Computers and Society*, 30(3), September 2000, hal 13-19 [<http://www.ljean.com/files/spaces.html>] diakses pada 14 Maret 2019 pukul 19.55 WIB.